

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Gereja sebagai tempat komunitas peziarahan iman terus-menerus bergulat dengan konteks di mana ia hidup. Sebagai komunitas iman, gereja juga ditantang untuk terus relevan dalam setiap perkembangan zaman. Hal inilah yang disoroti oleh Stephen B. Bevans dan Roger P. Schroeder bahwa gereja perlu mengambil berbagai bentuk misi yang tetap setia pada konteksnya yang senantiasa berubah.<sup>1</sup> Pada dasarnya, misi diambil dari bahasa Latin, yaitu *missio* yang juga disejajarkan dengan kata Yunani *apostolé* yang berarti pengutusan.<sup>2</sup> Menurut David J. Bosch, secara teologis misi dapat dipahami sebagai pemberitaan iman, pengembangan pemerintahan Allah, pertobatan, dan pembentukan jemaat baru.<sup>3</sup> Dengan kata lain, dalam konteks kehidupan bergereja *missio* dapat dipahami sebagai pengutusan yang didasari pada “karya Allah” (*Missio Dei/God's Mission*).<sup>4</sup> Oleh karena itu, gereja memiliki tugas untuk menyebarkan iman dan perluasan pemerintahan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia, termasuk dalam kehidupan nasional dan global.

---

<sup>1</sup> Stephen B Bevans Bevans and Roger P Schroeder, *Terus Berubah-Tetap Setia: Dasar, Pola, Konteks Misi*, satu (Maumere: ledalero, 2006), 479.

<sup>2</sup> Jan S Aritonang, *Teologi-Teologi Kontemporer* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2022), 146.

<sup>3</sup> David Jacobus Bosch, *Transforming Mission: Paradigm Shifts in Theology of Mission*, *American Society of Missiology Series*, no. 16 (Maryknoll, New York: Orbis Books, 1991), 1.

<sup>4</sup> Aritonang, *Teologi-Teologi Kontemporer*, 146.

Di satu pihak, gereja merupakan persekutuan umat Allah yang didasari oleh persekutuan dengan Roh Kudus sebagai perwujudan tubuh Kristus di dunia. Namun di lain pihak, gereja juga hidup dalam dimensi institusional sebagai lembaga keagamaan yang berarti kehidupannya diatur dalam wilayah kekuasaan negara. Dengan kata lain, gereja sebagai persekutuan umat Allah hadir dan hidup dalam kompleksitas multidimensional. Oleh karenanya, gereja hendaknya tetap kritis dalam menghadapi perkembangan zaman dan sekaligus bersikap profetis dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh negara. Berkaitan dengan itu, menurut Zakaria J. Ngelow, empat model dapat digunakan untuk melihat hubungan antara gereja dan negara, yaitu:<sup>5</sup>

*Pertama, "Supremasi Negara Terhadap Gereja".* Menurut Ngelow, ketika pemerintah memaksa komunitas Kristen untuk mengikuti struktur sosial yang dipaksakan oleh negara, dengan menganggap negara lebih penting daripada gereja, pesan Injil disalahartikan, dan ketika struktur politik menggunakan Injil sebagai dalih legitimasi. Fenomena serupa dapat dilihat pada masa Kekaisaran Romawi Timur (Byzantium), dimana supremasi negara terhadap gereja memberikan keistimewaan dan perlindungan negara pada gereja, tetapi sekaligus mengurangi kemampuan gereja dalam menyampaikan ajaran Injil kepada penguasa.

---

<sup>5</sup> A. Munir Mul Khan et al., "Agama Dan Negara : Perspektif Islam, Katolik, Budha, Hindu, Konghucu, Protestan" (Yogyakarta: Yogyakarta Institut Dian/Interfidei, 2002), 110-12.

Meskipun negara tidak ikut campur dalam ajaran gereja, namun memiliki hak untuk mengawasi institusi gereja. Pola hubungan semacam ini telah berkembang selama berabad-abad dalam Gereja Ortodoks, Gereja Lutheran, dan Gereja Calvinis, bahkan hingga masa kolonial Indonesia.

*Kedua, "Supremasi Gereja Terhadap Negara".* Pada abad pertengahan, Gereja Roma Katolik mengembangkan pola hubungan dengan negara berdasarkan gagasan tentang dua tingkat hubungan: adikodrati dan kodrati. Di sini, yang adikodrati tunduk dan diperbaiki oleh yang kodrati. Negara bertanggung jawab atas yang kodrati, sementara gereja bertanggung jawab atas yang adikodrati. Konsep "ajaran dua pedang", yang menyatakan bahwa gereja memiliki kekuasaan atas hal-hal rohani dan duniawi, menjadi landasan bagi keunggulan gereja. Ini berarti bahwa Paus—atau kepala gereja—dianggap sebagai raja tertinggi dari semua raja, dan negara-negara tunduk pada Gereja Roma Katolik.

Dalam konteks ini, selama reformasi, Protestan juga mendukung pembaharuan gereja, seperti teokrasi Calvin di Jenewa. Bentuk hubungan ini, pada pandangan tertentu, memberikan keuntungan duniawi bagi gereja. Namun, di sisi lain, pola hubungan ini juga melanggar hak asasi masyarakat untuk kebebasan beragama, terutama ketika pemerintahan Kristen disamakan dengan Kerajaan Allah. Dengan begitu, pola hubungan antara gereja dan negara tersebut memiliki implikasi kompleks

dan kontroversial, di mana kekuasaan dan pengaruh gereja terhadap negara bisa berdampak positif atau negatif tergantung pada sudut pandang dan pemahaman tentang kebebasan beragama.

*Ketiga, "Pemisahan Total"*. Ketika pandangan sekuler tentang negara semakin dominan dan kekuasaan gereja menurun, muncul pola pemisahan total antara keduanya. Negara dan gereja memiliki dasar, tujuan, dan pola hubungan yang berbeda. Perspektif sekuler liberal dan kedua aliran Kristen radikal mengabaikan pemahaman sosial Kristen, yang menekankan bahwa arti penting Injil sebagai tanda-tanda hadirnya Kerajaan Allah harus terimplementasi secara nyata dalam kehidupan manusia sebagai pribadi dan melalui melalui institusi gereja.

*Keempat, "Kemitraan yang Profetis"*. Berdasarkan pengalaman jemaat awal, para reformator mengembangkan hubungan kemitraan yang sehat antara gereja dan negara. Negara dan gereja memiliki fungsi bersama terhadap manusia dan masyarakat dalam hubungan kerja sama ini. Ada upaya untuk bekerja sama secara dinamis dalam berbagai cara yang sesuai dengan tugas fungsi masing-masing. Tentu ini berhubungan dengan fakta situasi-situasi seperti ketidakadilan, kemiskinan, penindasan, permusuhan, dan sejenisnya memiliki kecenderungan untuk merusak hakikat manusia dan masyarakatnya. Kerjasama dengan gereja, bagaimanapun, memiliki sifat kritis-profetis karena negara dianggap

sebagai hamba Allah, tetapi juga sebagai lembaga yang tidak luput dari kesalahan.

Dari keempat pembagian tersebut, penulis melihat bahwa model yang keempat dari hubungan gereja dan negara sebagai kemitraan yang profetis dapat ditelisik lebih jauh secara khusus dalam birokrasi pemerintahan di Indonesia. Dalam sistem pemerintahan modern saat ini, gereja dan birokrasi pemerintahan sangat penting. Meskipun gereja dan negara memiliki fungsi yang berbeda, keduanya dapat saling berkontribusi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara luas.

Berdasarkan hal tersebut, penulis melihat ada dua persoalan teologis yang belum ditelisik mengenai peran gereja dalam bermisi sebagai kemitraan yang profetis khususnya dalam birokrasi pemerintahan. *Pertama*, warga gereja juga merupakan warga negara yang melaksanakan tugas pelayanan dalam birokrasi pemerintahan harus memiliki dasar etika dan teologi yang memadai, agar dapat memahami dengan tepat hubungan antara gereja dan pemerintah. Dengan demikian warga gereja yang terpenggil untuk menjalankan misi gereja dalam tugas pelayanannya dalam birokrasi pemerintahan dapat mengetahui sejauh mana mereka harus taat kepada pemerintah dan mendukung kebijakan politiknya. *Kedua*, agar saling memahami hubungan mereka, pemerintah dan gereja harus terus berbicara satu sama lain. Ini berarti bahwa keduanya harus mengetahui sejauh mana pemerintah terlibat dalam

urusan gereja dan sebaliknya. Hal tersebut penting agar pemerintah tidak melakukan campur tangan yang dapat merusak kesucian gereja sebagai komunitas keagamaan yang sakral. Penulis melihat kedua persoalan teologis tersebut perlu diperhatikan secara serius jika gereja ingin memaknai misinya dalam birokrasi pemerintahan.

Sejauh ini, belum ada penelitian yang menyelidiki misi gereja dalam birokrasi pemerintahan. Pemahaman gereja tentang misi masih berkuat pada pekabaran Injil ke berbagai daerah, utamanya yang tergolong sebagai daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Padahal hubungan antara gereja dan pemerintah juga merupakan salah satu subjek bagi gereja untuk bermisi. Kehadiran warga gereja dalam birokrasi pemerintahan menjadi penting sebagai pintu masuk bagi gereja untuk menjalankan misi dalam birokrasi pemerintahan. Minimnya penulisan tentang topik ini membuat Penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut. Menurut Ngelow, gereja diutus oleh Tuhan untuk menerapkan kehendak Allah (tanda-tanda kerajaan Allah) di semua bidang, termasuk politik.<sup>6</sup> Artinya, gereja juga memiliki tanggung jawab untuk bersikap kritis dan profetis yang menyangkut dengan hal-hal politik, termasuk dalam birokrasi pemerintahan.

---

<sup>6</sup> Zakaria J Ngelow, John Campbell Nelson, and Julianus Mojau, *Pedoman Pelayanan Gereja Di Bidang Politik*, in *Teologi Politik: Panggilan Gereja Di Bidang Politik Pasca Orde Baru*, Pertama (Makassar: Yayasan Oase Intim, 2013), 295.

Tulisan ini hendak menganalisis secara teologis misi birokrat Kristen dalam birokrasi pemerintahan yang berbasis pada relasi gereja dan pemerintah sebagai kemitraan yang profetis. Kajian ini bertujuan untuk menemukan misi gereja sebagai *missio Dei* di dalam relasinya dengan birokrasi pemerintahan. Artinya, gereja sungguh hadir dan terus menjawab tantangan zaman dalam realitas kehidupan sehari-hari secara khusus dalam birokrasi pemerintahan. Akan tetapi berdasarkan fenomena yang penulis amati dan alami dalam birokrasi pemerintahan, misi birokrat Kristen dalam birokrasi pemerintahan tidak terlihat. Hal tersebut diakibatkan adanya kecenderungan para birokrat Kristen melihat hubungan gereja dan negara pada hubungan yang ketiga, yaitu "*pemisahan total*". Negara dan gereja dilihat sebagai dua lembaga yang memiliki dasar, tujuan, dan pola hubungan yang berbeda, sehingga dengan sendirinya memiliki maksud dan tujuan yang tentu saja berbeda.

Berangkat dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa meskipun pada hakikatnya kedua pandangan di atas sepakat melakukan penolakan terhadap "*Supremasi Negara Terhadap Gereja*" (hubungan pertama) dan "*Supremasi Gereja Terhadap Negara*" (hubungan kedua) antara gereja dan pemerintah, tetapi tulisan ini menjadi sangat menarik karena akan menganalisis relasi gereja dan pemerintah sebagai "*Kemitraan yang Profetis*" (hubungan keempat) di tengah kecenderungan birokrat Kristen

menempatkan dan mempraktekkan “*Pemisahan Total*” hubungan antara gereja dan negara (hubungan ketiga). Hal inilah yang nantinya akan diteliti oleh penulis untuk ditulis menjadi sebuah karya ilmiah dengan judul “Misi Sang Birokrat: Analisis Teologis Misi Birokrat Kristen dalam Birokrasi Pemerintahan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Toraja Utara.”

## **B. Fokus Masalah**

Penelitian tentang hubungan gereja dan pemerintah telah ditulis oleh beberapa penulis, yaitu: *pertama*, David Ming, dengan judul “Peranan Gereja dalam Sistem Pemerintahan yang Baik di Indonesia. Ming mengatakan bahwa gereja hendaknya mengimplementasikan wujud tanggung jawabnya terhadap masalah sosial yang sangat mendasar, seperti membangun pemerintahan yang baik.<sup>7</sup> *Kedua*, Herry Susanto dengan judul “The Church as God’s People and The Partner of State”. Susanto mengatakan bahwa gereja tidak bertentangan dengan negara, melainkan sebagai mitra yang memikul tanggung jawab sosial yang sama untuk mewujudkan shalom bagi warga gereja, dan masyarakat secara umum.<sup>8</sup> *Ketiga*, Suarbudaya Rahadian and Fially Falderama, dengan judul “Sikap Kritis Terhadap Kekuasaan Dalam Tradisi Calvinist: Sebuah Kajian Historis-Teologis tentang Kekritisian

---

<sup>7</sup> David Ming, “Peranan Gereja Dalam Sistem Pemerintahan Yang Baik Di Indonesia,” *Jurnal Kadesi* 3, no. 2 (2021): 85–103, <https://doi.org/10.54765/ejurnalkadesi.v3i2.4>.

<sup>8</sup> Herry Susanto, “The Church as God’s People and The Patner of State,” *Jurnal Jaffray* 17, no. 1 (2019): 35–56, <https://doi.org/10.25278/jj.v17i1.298>.

Gereja Terhadap Pemerintah untuk Mewujudkan Regnum Christi". Rahadian dan Fallderama mengatakan bahwa seluruh aspek kehidupan tidak luput dari kesalahan, demikian juga pemerintah memiliki peluang yang sama jatuh dalam kesalahan. Jadi, selain memiliki sikap konformis, ajaran Calvinist juga memiliki dasar teologis yang memungkinkan untuk memiliki sikap kritis kepada kekuasaan.<sup>9</sup> *Keempat*, Jordan Pakpahan, dengan judul "Politik Keadilan: Peran Politik Gereja Di Masa Kini", Pakpahan meminta pemerintah bertanggung jawab atas tindakannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah dapat menerapkan kekuasaan berdasarkan keadilan dengan mendengar kritik gereja yang profetis, konstruktif, dan edukatif.<sup>10</sup>

Karena banyaknya tema yang berkaitan dengan hubungan gereja dan pemerintah, maka tulisan ini dibatasi pada misi birokrat Kristen dalam birokrasi pemerintahan yang berbasis pada relasi gereja dan pemerintah sebagai kemitraan yang profetis, dengan judul: "Misi Sang Birokrat: Analisis Teologis Misi Birokrat Kristen dalam Birokrasi Pemerintahan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Toraja Utara."

### C. Rumusan Masalah

---

<sup>9</sup> Suarbudaya Rahadian and Fially Fallderama, "Sikap Kritis Terhadap Kekuasaan Dalam Tradisi Calvinist: Sebuah Kajian Historis-Teologis Tentang Kekritisan Gereja Terhadap Pemerintah Untuk Mewujudkan Regnum Christi," *Societas Dei: Jurnal Agama Dan Masyarakat* 7, no. 2 (2020): 219–44, <https://doi.org/10.33550/sd.v7i2.173>.

<sup>10</sup> Jordan Pakpahan, "Politik Keadilan: Peran Politik Gereja Di Masa Kini," *Loko Kada Jurnal Teologi Kontekstual & Oikumenis* Vol. 02, no. 02 (2022): 102–13, <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3271975&val=28718&title=Politik Keadilan Peran Politik Gereja di Masa Kini>.

Rumusan masalah didasarkan pada fokus penelitian yang telah diuraikan di atas, yaitu bagaimana Analisis Teologis Misi Birokrat Kristen dalam Birokrasi Pemerintahan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Toraja Utara?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Mencermati uraian rumusan masalah di atas, tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis secara teologis misi gereja dalam birokrasi pemerintahan yang berbasis pada relasi gereja dan pemerintah sebagai kemitraan yang profetis. Kajian ini dilakukan untuk menemukan misi gereja sebagai *missio Dei* di dalam relasinya dengan birokrasi pemerintahan melalui analisis secara teologis misi birokrat Kristen dalam birokrasi pemerintahan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Toraja Utara.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Diharapkan bahwa tujuan penelitian ini akan memiliki manfaat teoritis dan praktis, yaitu:

1. Secara teoritis, diharapkan bahwa penelitian ini akan meningkatkan dan memperkaya ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang teologi misi, yang terus berupaya untuk mewartakan dan menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah dalam seluruh aspek kehidupan termasuk dalam birokrasi pemerintahan dan politik seperti yang telah ditulis

oleh beberapa tokoh diantaranya: Zakaria J. Ngelow, A. A. Yewangoe dan Eka Darmaputera.

2. Secara praktis, diharapkan bahwa penelitian ini akan membantu gereja memetakan misinya dalam birokrasi pemerintahan dari perspektif teologis. Hasilnya akan dapat diterapkan pada kehidupan politik yang lebih luas dan pada generasi berikutnya.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Tulisan ini akan dibagi dalam lima bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, berisi: Latar Belakang Masalah, Fokus Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, berisi: Penjelasan tentang Misi Gereja dan Birokrasi.

Bab III Metode Penelitian, berisi tentang Jenis Metode Penelitian dan Alasan Pemilihannya, Tempat Penelitian dan Alasan Pemilihannya, Subjek Penelitian/Informan, Jenis Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, dan Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.

Bab IV Temuan Penelitian dan Analisis Teologis, berisi deskripsi hasil penelitian dan analisis teologis hasil penelitian.

Bab V Penutup, pada bab ini terdapat kesimpulan dan saran-saran berdasarkan hasil-hasil penelitian di lapangan dan paparan analisis teologis yang diperoleh.

